

**TINJAUAN STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR
SATUAN MANUNGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



DAFFA AURA
BP/NIM : 2021/21233027

PROGRAM STUDI MANAJAMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR
SATUAN MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG

Nama : Daffu Aura
BP/Nim : 2021/21233027
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

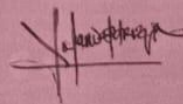
Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004

Padang, Agustus, 2025

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Yolanda Fitri Zulvia, SE, Msi
NIP. 198612312015042002

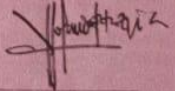
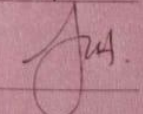
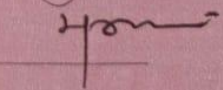
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR
SATUAN MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG

Nama : Daffa Aura
BP/Nim : 2021/21233027
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Yunita Engraini, SE, MM	(Anggota)	
3. Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daffa Aura
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233027
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 26 Juni 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Talang Barat, Kec Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Strategi Untuk Meningkatkan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 23 Juli 2025



ABSTRAK

**DAFFA AURA / 2021/21233027 : TINJAUAN STRATEGI UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) DI KANTOR
SATUAN MANUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT) KOTA PADANG**

Dosen Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si

Pajak merupakan salah satu faktor utama pembangun dalam sistem keuangan negara dan daerah. Dalam konteks negara modern, pajak tidak hanya menjadi sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga alat untuk menciptakan pemerataan dan kestabilan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak daerah maupun pajak pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi pengoptimalan bea balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025 yang berlokasi di Kantor satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang yang beralamat di JL. Asahan No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat. Data yang didapat berupa data wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, Selama periode 2020–2024, Penerimaan tertinggi tercapai pada 2022 dan Terendah pada tahun 2020. penerimaan BBNKB ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, administrasi, kepatuhan wajib pajak dan teknologi. kemudian dalam penerimaan BBNKB menghadapi beberapa hambatan seperti terbatasnya kapasitas SDM, lemahnya koordinasi antar instansi, dan perubahan regulasi yang belum tersosialisasi.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib Pajak, BBNKB, Bea balik nama

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan YME atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Strategi Untuk Meningkatkan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Di Kantor Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang”

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi (DIII) Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan pada setiap langkah demi langkah yang penulis lakukan padaat pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, dan adik-adik yang menjadi panutan penulis untuk selalu bersemangat serta selalu setia mendoakan, menemani, memotivasi dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T.,M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dekan Prof. Prengki Susanto, S.E., M.Sc, Ph.D. Beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibuk Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis

dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Bapak Firman, SE, M.Sc selaku ketua prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Hendri Andi Mesta, MM selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dalam kesempurnaan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/i Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Karyawan dan karyawan Kantor BPKD yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan magang di Kantor BPKD Kabupaten Padang Pariaman.
12. Teman seperjuangan siapapun namanya yang selalu menemani dan memberikan support dari awal pembuatan hingga Tugas Akhir ini selesai.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Juli 2025

DAFFA AURA
2021/21233027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
B. Pajak Daerah	12
C. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13
1. Definisi dan Dasar Hukum BBNKB	13
2. Objek dan Subjek BBNKB	13
3. Tarif dan Dasar Pengenaan BBNKB.....	14
D. Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).....	15
1. Pengertian dan Fungsi Kantor Samsat.....	15
2. Pelayanan di Kantor Samsat	16
E. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah	16
1. Konsep Strategi dalam Administrasi Publik.....	16
2. Strategi Peningkatan Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah	17
3. Inovasi dalam Pengelolaan BBNKB	18
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan BBNKB.....	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	20
1. Lokasi Penelitian.....	20

2. Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Tahapan Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	23
4. Sumber Data Penelitian.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Profil Instansi	26
1. Sejarah Kantor SAMSAT Kota Padang	26
2. Visi, Misi dan Motto SAMSAT Kota Padang.....	27
3. Wilayah Kerja Kantor SAMSAT Padang.....	28
4. Struktur Organisasi	28
5. Unit Kerja	29
B. Pembahasan.....	32
1. Analisis Kondisi Eksisting Pengelolaan dan Penerimaan BBNKB di Kantor SAMSAT Kota Padang	32
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan BBNKB di Kantor SAMSAT Kota Padang	35
3. Strategi untuk Meningkatkan Pendapatan BBNKB di Kantor SAMSAT Kota Padang.....	38
4. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Strategi Peningkatan Pendapatan BBNKB dan Solusi untuk Mengatasinya	43
5. Model Strategi Terintegrasi untuk Peningkatan Pendapatan BBNKB di Kantor SAMSAT Kota Padang	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pajak Daerah yang Dikelola oleh Bapenda Kota Padang.....	3
Tabel 2. Data target dan realisasi penerimaan BBNKB	4
Tabel 3. Data target dan realisasi penerimaan BBNKB	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah	29
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian	54
Lampiran 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Data Dinas Penanaman Modal	55
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	56
Lampiran 4. Data Rekapitulasi penerimaan PKB dan BBNKB	59
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Bersama Ibuk Febrika Bimantara. S. H.	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu faktor utama pembangun dalam sistem keuangan negara dan daerah. Dalam konteks negara modern, pajak tidak hanya menjadi sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga alat untuk menciptakan pemerataan dan kestabilan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut lembaga pemungutannya, pajak terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara ,Ramadhan (2019), Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34/2000). Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000). Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan Pembangunan daerah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Di Kota Padang, pengelolaan BBN-KB dilaksanakan oleh Kantor Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik terintegrasi untuk administrasi kendaraan bermotor. Meskipun memiliki peran strategis, dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai tantangan dalam optimalisasi pendapatan BBN-KB di Kota Padang yang memerlukan tinjauan strategis.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang vital bagi pelaksanaan otonomi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan adalah pajak kendaraan bermotor termasuk di dalamnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Menurut Putra dan Supadmi (2018), penerimaan BBN-KB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, di mana peningkatan penerimaan BBN-KB akan berdampak pada peningkatan PAD secara keseluruhan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dikenakan setiap tahun oleh pemerintah provinsi kepada wajib pajak atas kendaraan yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih dan digunakan di semua jenis jalan darat, serta digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas perubahan hak kepemilikan kendaraan bermotor. BBNKB hanya dibayarkan sekali saat terjadi perpindahan hak milik kendaraan, misalnya dalam jual beli kendaraan bekas, hibah, atau warisan. Menurut Siahaan (2010:209), BBNKB termasuk pajak yang bersifat tidak langsung dan hanya dikenakan satu kali pada saat transaksi kepemilikan kendaraan terjadi. Widhiyanti (2018) menyebutkan bahwa PKB dan BBNKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang bersifat langsung dan berkelanjutan selama kendaraan dimiliki, dan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang menjadi lembaga pemungut yang berwenang dalam memungut dan mengelola penerimaan dari PKB dan BBNKB, dan yang menjadi lokasi pemungutan PKB dan BBNKB adalah di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pemerintah provinsi, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mengelola berbagai jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah setiap tahunnya. Berikut ini disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Provinsi pada tahun 2024 pada Tabel 2.

Tabel 1. Pajak Daerah yang Dikelola oleh Bapenda Kota Padang

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	(%)
1	PKB	Rp. 325.965.568.437	Rp. 325.741.394.400	99,93
2	BBNKB	Rp. 147.847.177.244	Rp. 144.778.742.800	97,92
3	Bahan Bakar	Rp. 14.000.000.000	Rp. 15.120.000.000	108
4	Air Permukaan	Rp. 4.500.000.000	Rp. 4.275.000.000	95
5	Rokok	Rp. 11.000.000.000	Rp. 11.770.000.000	107
6	Alat Berat	Rp. 3.200.000.000	Rp. 2.880.000.000	90
	Jumlah	Rp 506.512.745.681	Rp 610.495.137.200	120,53

Sumber : BAPENDA Kota Padang (2025)

Tabel 1 menunjukkan data Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang pada tahun 2024. Berdasarkan data

tersebut, secara keseluruhan realisasi pajak daerah mencapai Rp 610.495.137.200 dari target sebesar Rp 506.512.745.681, atau mencapai 120,53% dari target yang ditetapkan. Secara khusus untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), realisasi penerimaan mencapai Rp 144.778.742.800 dari target sebesar Rp 147.847.177.244 atau setara dengan 97,92% dari target. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, BBNKB menempati posisi kedua sebagai kontributor terbesar pendapatan pajak daerah di Kota Padang setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Gap ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik yang perlu dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pencapaian target BBNKB.

Sebagai gambaran umum penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, berikut ini disajikan data target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Padang pada tahun 2020–2024:

Tabel 2. Data target dan realisasi penerimaan BBNKB di Kota Padang pada tahun 2020–2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2020	259.365.745.000	97.685.391.150	37,66%
2021	112.009.411.000	131.595.740.150	117,49%
2022	132.914.356.600	150.236.900.150	113,03%
2023	159.056.230.500	149.903.535.100	94,25%
2024	147.847.177.244	144.778.742.800	97,92%

Sumber : Olahan Data Satuan Manunggal Satu Atap Kota Padang (2025)

Tabel 2 menampilkan data target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Padang selama periode 2020 hingga 2024 yang menunjukkan dinamika perkembangan yang menarik untuk dikaji. Penerimaan BBNKB sebagai salah satu komponen pajak daerah mengalami

fluktuasi yang signifikan selama kurun waktu tersebut, mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pajak daerah di Kota Padang.

Pemulihan dramatis terjadi pada 2021 dengan pencapaian 117,49%, didukung penyesuaian target yang lebih realistis dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi. Momentum positif berlanjut pada 2022 dengan realisasi 113,03% dan nominal tertinggi selama lima tahun sebesar Rp 150,23 miliar. Namun, tren menurun muncul pada 2023-2024 dengan realisasi di bawah target, masing-masing 94,25% dan 97,92%. Meskipun terjadi perbaikan persentase pada 2024, secara nominal terjadi penurunan baik target maupun realisasi yang mengindikasikan adanya tantangan berkelanjutan dalam optimalisasi penerimaan BBNKB.

Pola ini menunjukkan adanya pengaruh kuat faktor eksternal seperti pandemi dan kondisi ekonomi, serta kebutuhan mendesak akan tinjauan komprehensif terhadap strategi pengelolaan BBNKB di Kota Padang. Evaluasi mendalam diperlukan terhadap aspek regulasi, kualitas pelayanan, penerapan teknologi, dan strategi sosialisasi untuk merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan dari sektor ini di masa mendatang.

Permasalahan dalam pengelolaan BBN-KB di Kota Padang tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal. Hamzah (2021) mengidentifikasi bahwa masalah administratif, kesadaran wajib pajak, dan kompleksitas prosedur menjadi faktor utama yang mempengaruhi optimalisasi pendapatan dari sektor BBN-KB di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kondisi di Kota Padang di mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor masih perlu ditingkatkan.

Aspek pelayanan publik juga menjadi sorotan dalam pengelolaan BBN-KB. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh institusi pengelola pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Kantor SAMSAT Kota Padang sebagai institusi yang mengelola BBN-KB perlu mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dari sektor ini.

Penelitian terdahulu oleh Pratiwi dan Merkusiwati (2019) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan BBN-KB yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek administratif, sumber daya manusia, teknologi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Di Kota Padang, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BBN-KB, namun belum optimal karena belum adanya strategi terintegrasi yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan dinamika perubahan perilaku wajib pajak.

Studi yang dilakukan oleh Rahman (2022) mengidentifikasi bahwa koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan BBN-KB sangat mempengaruhi efektivitas pemungutan dan penagihan pajak. Sebagai kantor pelayanan terintegrasi, SAMSAT Kota Padang melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan Jasa Raharja yang memerlukan koordinasi efektif.

Selain itu, faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi regional dan daya beli masyarakat juga memiliki korelasi signifikan dengan tingkat penerimaan BBN-KB. Fluktuasi kondisi ekonomi di Kota Padang, terutama pasca pandemi COVID-19, telah mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakan termasuk BBN-KB.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan suatu tinjauan komprehensif terhadap strategi peningkatan pendapatan BBN-KB di Kantor SAMSAT Kota Padang. Menurut Firmansyah (2023), pendekatan strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah harus mempertimbangkan aspek efisiensi administratif, kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, inovasi teknologi, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan pendapatan BBN-KB di Kantor SAMSAT Kota Padang dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang?
3. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang?
4. Apa hambatan-hambatan dalam implementasi strategi peningkatan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi eksisting pengelolaan dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang.
3. Merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang.
4. Menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi strategi peningkatan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor SAMSAT Kota Padang dan merumuskan solusi untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya terkait pengelolaan pendapatan daerah dan strategi peningkatan pendapatan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BBN-KB sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah.

- c. Mengembangkan kerangka konseptual tentang strategi peningkatan pendapatan daerah yang dapat diaplikasikan dalam konteks pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang:
 - 1) Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk optimalisasi pendapatan dari sektor BBN-KB.
 - 2) Memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi dan sistem pengelolaan BBN-KB yang lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi Kantor SAMSAT Kota Padang:
 - 1) Menjadi bahan evaluasi kinerja pengelolaan BBN-KB dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.
 - 2) Memberikan referensi untuk pengembangan strategi peningkatan kualitas pelayanan dan sistem administrasi BBN-KB.
- c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat:
 - 1) Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran BBN-KB dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
 - 2) Memberikan informasi tentang proses dan mekanisme pembayaran BBN-KB yang transparan.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - 1) Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan di bidang pengelolaan

pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

- 2) Mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang dapat dikembangkan dalam studi selanjutnya terkait strategi peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis data, dan wawancara yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kondisi Penerimaan BBNKB Mengalami Fluktuasi

Selama periode 2020–2024, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Penerimaan tertinggi tercapai pada 2022, sedangkan capaian terendah terjadi pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun terjadi perbaikan pada 2024, target belum sepenuhnya tercapai (97,92%).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan BBNKB

- a. Faktor Ekonomi: Penurunan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi pasca-pandemi berdampak langsung pada volume transaksi kendaraan.
- b. Faktor Administratif: Masih ditemui prosedur pelayanan yang rumit, waktu pelayanan panjang, serta kendala dalam sistem administrasi.
- c. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak: Rendahnya literasi perpajakan serta minimnya sosialisasi menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak.
- d. Faktor Teknologi: Meskipun telah diterapkan sistem digital (aplikasi SIGNAL), beberapa proses masih harus dilakukan secara manual di kantor SAMSAT.

3. Strategi Peningkatan Pendapatan BBNKB yang Efektif

Strategi peningkatan pendapatan BBNKB di Kota Padang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur dan pelatihan SDM.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak kendaraan bermotor.
- c. Digitalisasi sistem administrasi dan integrasi data antar instansi.
- d. Sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan.

4. Hambatan dan Solusi Implementasi Strategi

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi mencakup:

- a. Terbatasnya kapasitas SDM → Solusi: pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional.
- b. Lemahnya koordinasi antar instansi → Solusi: forum koordinasi rutin dan sistem terintegrasi.
- c. Perubahan regulasi yang belum tersosialisasi → Solusi: masa transisi regulatif dan peningkatan literasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pendapatan BBNKB di Kantor SAMSAT Kota Padang adalah:

1. Penyederhanaan Prosedur dan Layanan Prima

Pemerintah perlu mengoptimalkan layanan berbasis teknologi, mempercepat proses administrasi, dan menerapkan standar pelayanan prima yang fokus pada kepuasan masyarakat.

2. Penguatan Literasi dan Sosialisasi Pajak

Sosialisasi aktif melalui media sosial, kegiatan edukatif di lingkungan sekolah dan komunitas, serta publikasi prosedur pembayaran BBNKB secara visual dan mudah diakses sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Perlu dilakukan pelatihan rutin bagi petugas SAMSAT mengenai sistem informasi perpajakan, pelayanan publik, serta adaptasi regulasi terbaru.

4. Pemutakhiran dan Integrasi Data

Integrasi data kendaraan antar lembaga (Polri, BAPENDA, Jasa Raharja) harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor yang dikenakan pajak.

5. Evaluasi Periodik dan Monitoring Terintegrasi

Diperlukan sistem evaluasi kinerja penerimaan pajak secara berkala agar strategi dapat disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. 5th Edition. Jossey-Bass.
- Firmansyah. (2023). Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 65-89.
- Hamzah, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Era New Normal. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 42-72.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 129-146.
- Putra, I. M. A. D., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 90-105.
- Rahman, F. (2022). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Era Digital: Studi Kasus di Lima Provinsi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 76-98.

Siahaan, M. P. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT.

Rajagrafindo Persada.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2020). Implementasi Digitalisasi Administrasi

Perpajakan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(2), 110-128.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.